PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13
TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah peraturan daerah sebagai mana dimaksud huruf a;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah desa di kabupaten bantul;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13
TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2000 tentang susunan dan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di kabupaten bantul (lembaran daerah kabupaten bantul seri D niomor 02) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2001 (lembaran daerah kabupaten bantul seri D nomor 08) diubah lagi sebagai berikut:

- A. Dalam semua pasal dan penjelasan sebagai berikut :
- a. Penyebutan “Kepala Desa” harus di baca “Lurah”.
 - b. Penyebutan “Perangkat Desa” dibaca “Pamong Desa”.
 - c. Penyebutan “Sekretaris desa” dibaca “Carik”
 - d. Penyebutan “Seksi” dibaca “bagian”
 - e. Penyebutan “Kepala Dusun” dibaca “Dukuh”
 - f. Penyebutan “Dusun” dibaca “Pedukuhan”
 - g. Perkataan “kepala urusan” di hapuskan.
- B. Ketentuan pasal 1 angka 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

10. Pamong Desa adalah unsur Pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, kepala Bagian dan Dukuh.

- C. Ketentuan pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :

- a. unsur Pimpinan ialah lurah;
- b. unsur staf adalah carik
- c. unsut pelaksana ialah bagian;
- d. unsur wilayah ialah dukuh;

D. Ketentuan pasal 2 ayat (4) dihapus.

E. Ketentuan pasal 2 ayat (4) menjadi ayat (3a) berbunyi sebagai berikut :

(3a) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c pasal ini terdiri atas :

- a. Bagian pemerintahan;
- b. Bagian Pembangunan;
- c. Bagian Agama dan kesejahteraan rakyat;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian umum.

F. Ditambah ketentuan pasal 2 ayat (4a) sebagai berikut :

- (4a) Kepala Bagian secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada lurah melalui carik.
- (5) Bagian Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini..

G. Ketentuan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :